

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan saat ini merupakan salah satu tuntutan publik. Hal ini bertujuan untuk terciptanya suatu pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

#### **1.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

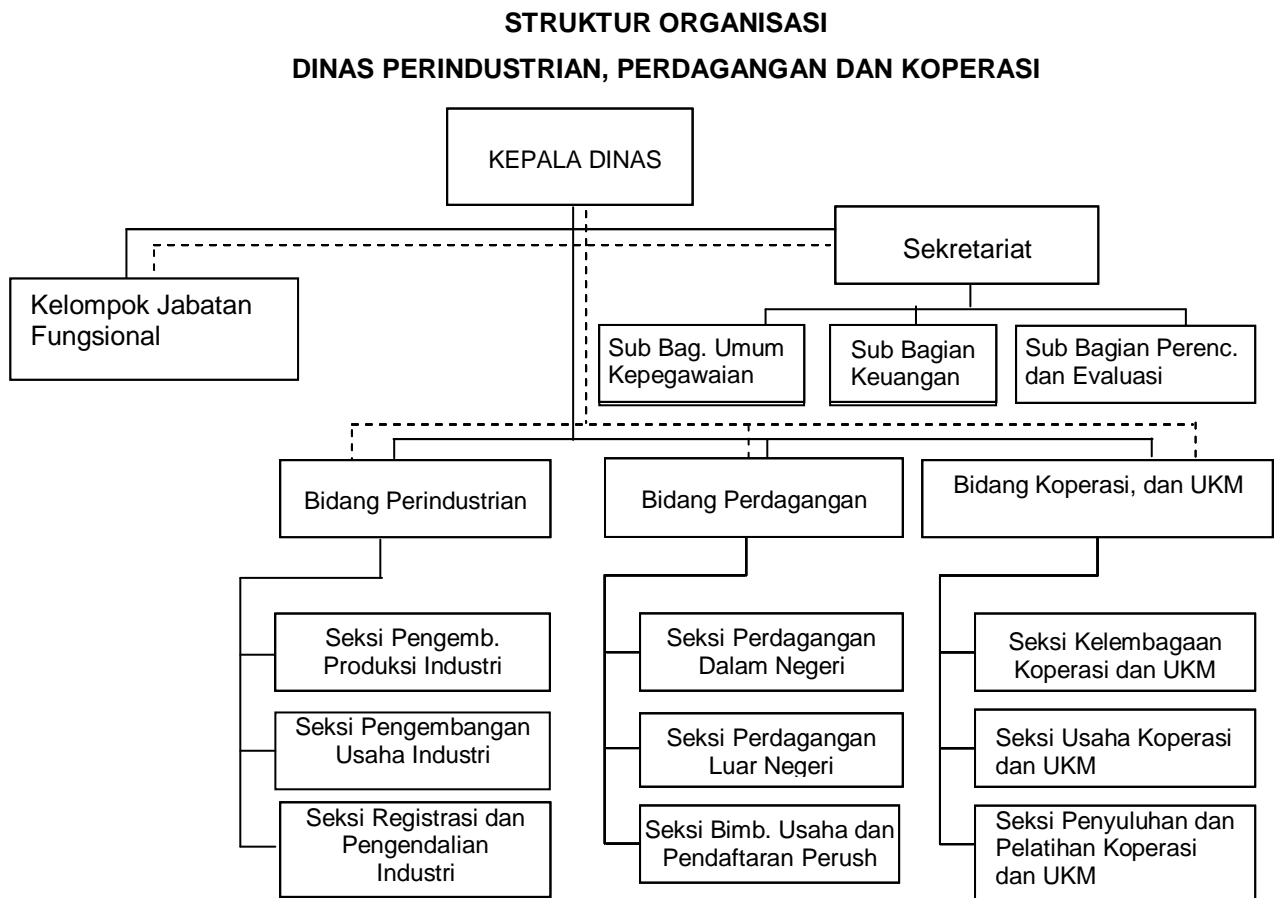
##### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

##### **2. Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- b. Pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- d. Pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Struktur Organisasi:**



Keterangan:  
 \_\_\_\_\_ : garis perintah  
 - - - - - : garis koordinasi

**1.3. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretariat**

**a. Tugas :**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

**b. Fungsi :**

- 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) penyelenggaraan urusan umum;
- 4) penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- 5) penyelenggaraan urusan keuangan;
- 6) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- 7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

**3. Bidang Perindustrian****a. Tugas :**

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri

**b. Fungsi :**

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian
- 2) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri
- 3) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri
- 4) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri
- 5) penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan registrasi dan pengendalian industri; dan
- 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perindustrian.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produksi Industri.

- b. Seksi Pengembangan Usaha Industri.
- c. Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri.

#### **4. Bidang Perdagangan**

##### **a. Tugas :**

Menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan

##### **b. Fungsi :**

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan.
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri.
- 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri.
- 5) Penyelenggaraan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan; dan
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdagangan.

Bidang Pedagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- c. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

#### **5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

##### **a. Tugas :**

Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

##### **b. Fungsi :**

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- 5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.
- c. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sesuai dengan keahlian.
7. **Unit Pelaksana Teknis**, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi saat ini belum memiliki UPT.

#### 1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu-isu strategis atau tantangan yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM
- b. Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
- c. Terbatasnya akses modal, pasar dan adopsi teknologi
- d. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.
- e. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/ barang strategis
- f. Masih rendahnya daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global dikaitkan pemberlakuan perdagangan di kawasan ASEAN/MEA.
- g. Penataan toko modern (jejaring) masih menjadi isu yang hangat.